

# Formulasi Regulasi dan Kebijakan Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi pada Program Makan Bergizi Gratis

Amril <sup>1\*</sup>, Hasan Sazali <sup>2</sup>

<sup>1\*,2</sup>Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

*Email:* [amril@gmail.com](mailto:amril@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [hasansazali@uinsu.ac.id](mailto:hasansazali@uinsu.ac.id) <sup>2</sup>

## Histori Artikel:

*Dikirim* 26 Juli 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 7 Agustus 2025; *Diterima* 10 Agustus 2025; *Diterbitkan* 10 September 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi dan kebijakan komunikasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan fokus pada efektivitas regulasi sebagai pedoman pelaksana daerah dan hambatan komunikasi yang mengganggu implementasi. Menggunakan studi literatur dan pendekatan kualitatif deskriptif, data dianalisis secara tematik melalui dokumen relevan. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih terkendala oleh tidak adanya regulasi teknis, lemahnya strategi komunikasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatan lainnya meliputi minimnya pedoman operasional, perbedaan pemahaman antar pelaksana, kesenjangan digital, serta rendahnya literasi komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan komunikasi yang inklusif, partisipatif, berbasis budaya lokal, dan didukung teknologi digital. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan program MBG serta mendorong terciptanya pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

**Kata Kunci:** Formulasi Regulasi; Kebijakan Komunikasi; Program Makan Bergizi Gratis.

## Abstract

This study aims to analyze regulations and communication policies in the Free Nutritious Meal Program (MBG), focusing on the effectiveness of regulations as guidelines for regional implementers and communication barriers that interfere with implementation. Using a literature study and a descriptive qualitative approach, the data were analyzed thematically through relevant documents. The results show that the implementation of the program is still constrained by the absence of technical regulations, weak communication strategies, and low community participation. Other obstacles include the lack of operational guidelines, differences in understanding between implementers, digital divides, and low communication literacy. Therefore, this study recommends the need for a reformulation of communication policies that are inclusive, participatory, based on local culture, and supported by digital technology. This strategy is expected to strengthen the effectiveness of the implementation of the MBG program and encourage the creation of fair, equitable, and sustainable development in various regions of Indonesia.

**Keyword:** Formulation of Communication; Regulations and Policies; Free Nutritious Meal Programs.

## 1. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mencegah stunting. Program ini berlandaskan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya ketahanan pangan dan gizi dalam pembangunan sumber daya manusia (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Selain itu, pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 memperkuat koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan program lebih efektif dan berkelanjutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Berdasarkan dasar hukum tersebut, MBG dirancang untuk berjalan secara terstruktur dan mendukung kualitas generasi mendatang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan sasaran awal 600 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, yang meliputi siswa sekolah dasar hingga menengah, serta ibu hamil dan menyusui (CNN Indonesia, 2025). Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan asupan gizi, mendukung konsentrasi belajar anak, dan menurunkan angka stunting. Selain itu, MBG dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penggunaan produk pangan dalam negeri. Program ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang lebih sehat, kuat, dan produktif di masa depan. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui tiga skema utama, yaitu penyediaan makanan langsung di sekolah, pemberian voucher makanan, dan distribusi bahan makanan untuk dimasak di rumah (Indonesia.go.id, 2024). Ketiga skema ini dirancang agar sesuai dengan kondisi geografis dan infrastruktur di berbagai daerah Indonesia, sehingga dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara optimal.

Evaluasi awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan peningkatan asupan gizi di kalangan siswa, namun masih ditemukan beberapa kendala di lapangan. *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) mencatat bahwa beberapa sekolah mengalami keterlambatan dalam distribusi makanan dan menu yang kurang bervariasi. Selain itu, kualitas pelaksanaan program berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menandakan perlunya penyesuaian strategi sesuai kondisi lokal (CISDI, 2025). Temuan ini menjadi masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program agar lebih merata, efisien, dan tepat sasaran, serta mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di seluruh daerah Indonesia. Hingga kini, regulasi yang tersedia hanya berupa Surat Keputusan Deputy Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024, namun dokumen ini belum dipublikasikan secara luas. Ketiadaan pedoman yang rinci menyulitkan koordinasi antarinstitusi dan menghambat proses evaluasi secara menyeluruh (CISDI, 2025). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga mencatat adanya komunikasi kebijakan yang belum efektif antara pemerintah pusat dan pelaksana di lapangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Kemenko PMK, 2025). Hal ini terlihat dari beberapa sekolah yang menyatakan belum memahami prosedur pelaksanaan program secara jelas, sementara masyarakat juga merasa kurang mendapat informasi mengenai manfaat dan cara mengakses program, sebagaimana dilaporkan oleh CISDI (2025). Kurangnya komunikasi yang konsisten dan terpadu menyebabkan perbedaan penafsiran di berbagai daerah, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi program secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci dan transparan agar pelaksanaan program lebih terarah, akuntabel, dan mudah dimonitor di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai penelitian menegaskan bahwa komunikasi yang efektif memegang peran krusial dalam keberhasilan program sosial seperti MBG. Penelitian oleh Alamsyah (2021) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah daerah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Sementara itu, studi oleh Suryaningsih & Ivanna (2024) menekankan pentingnya strategi komunikasi politik yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan desa. Temuan-temuan ini menegaskan urgensi strategi komunikasi yang tepat dalam implementasi program. Amam & Rusdiana (2022) menyoroti bahwa perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah sering menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kurangnya pelatihan komunikasi bagi pelaksana program

di tingkat lokal menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi tidak seragam dan menimbulkan kebingungan. Masalah ini membuat program sulit mencapai efektivitas optimal karena masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat program. Meninjau penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa kajian mengenai regulasi dan kebijakan komunikasi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat terbatas. Studi oleh Alamsyah (2021) dan Suryaningsih & Ivanna (2024) lebih fokus pada peran media sosial dan strategi komunikasi politik dalam pelayanan publik serta pembangunan desa, namun belum menyentuh aspek regulasi komunikasi yang formal dan terstruktur dalam konteks kebijakan nasional.

Demikian pula, penelitian Amam & Rusdiana (2022) menyoroti perbedaan interpretasi kebijakan antara pusat dan daerah, tetapi tidak mengupas secara spesifik bagaimana regulasi komunikasi disusun, disosialisasikan, dan dijalankan dalam program sosial. Akibatnya, belum ada studi yang secara langsung mengaitkan kelemahan regulasi komunikasi dengan kendala pelaksanaan program di tingkat operasional. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus utama pada analisis regulasi dan kebijakan komunikasi dalam pelaksanaan MBG. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana regulasi komunikasi disusun oleh otoritas nasional, sejauh mana regulasi tersebut mampu menjadi panduan bagi pelaksana daerah, serta bagaimana mekanisme sosialisasi, koordinasi, dan umpan balik diatur dalam dokumen kebijakan resmi. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan teori komunikasi publik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperbaiki struktur regulasi dan memperkuat sistem komunikasi kebijakan, sehingga pelaksanaan MBG dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan adaptif terhadap konteks lokal.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan menganalisis beragam literatur dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk *Peraturan Presiden* dan *Surat Keputusan Badan Gizi Nasional*, serta laporan evaluasi dari lembaga terkait seperti *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri). Selain itu, artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan komunikasi dan implementasi program sosial akan ditelaah secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi serta hambatan komunikasi yang menghambat pelaksanaan program ini. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelompokan tematik dan sintesis isi, sebagaimana yang diusulkan oleh Booth *et al.* (2012) dan Machi & McEvoy (2016). Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan untuk mengisi kekosongan kajian terkait peran regulasi komunikasi dalam pelaksanaan program sosial berskala nasional seperti MBG. Studi ini akan berfokus pada mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam kebijakan komunikasi dan menyarankan perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki implementasi program MBG, mengatasi hambatan komunikasi yang ada, dan memastikan program dapat mencapai tujuannya secara lebih efektif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

#### 3.1.1 Ketimpangan Regulasi dan Hambatan Komunikasi dalam Implementasi Program MBG

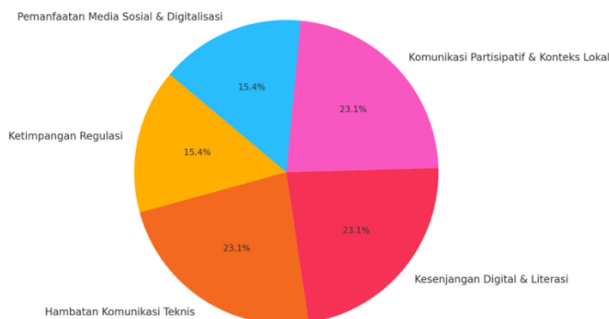
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis dari pemerintah Indonesia untuk mencegah stunting dan meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia. Meskipun didukung oleh *Perpres No. 83 Tahun 2024*, program ini belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah

belum adanya petunjuk teknis yang jelas, yang menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana dalam menerapkan kebijakan. Akibatnya, koordinasi antara instansi terkait pun menjadi lemah. Kurangnya regulasi operasional yang rinci disebut sebagai faktor utama yang menghambat implementasi program ini (Sarjito, 2024). Perbaikan pedoman pelaksanaan sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan lebih efektif. Ketiadaan pedoman komunikasi yang jelas membuat pelaksana program MBG di daerah mengalami kebingungan. Banyak sekolah yang belum menerima informasi yang cukup mengenai cara menjalankan program dan bagaimana distribusi makanan bergizi seharusnya dilakukan. Akibatnya, distribusi menjadi tidak merata dan banyak penerima manfaat yang tidak mendapatkan manfaat secara optimal (CISDI, 2025). Herdiana (2025) juga menyatakan bahwa perbedaan pemahaman antar pelaksana menyebabkan ketidaksesuaian dalam layanan. Situasi ini menyoroti pentingnya adanya panduan komunikasi yang terstruktur agar pelaksanaan program di lapangan bisa berjalan seragam, efisien, dan tepat sasaran sesuai harapan awal. Selain masalah regulasi, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan Program MBG. Informasi yang diterima pelaksana dari pusat sering kali tidak lengkap atau terlambat, yang membuat proses pelaksanaan menjadi tidak efektif. Menurut Amam & Rusdiana (2022), perbedaan dalam menafsirkan aturan membuat pelaksanaan kebijakan tidak selaras. Masalah ini diperburuk dengan tidak adanya forum umpan balik yang efektif antara daerah dan pusat. Ditambah lagi, daerah terpencil dengan akses internet terbatas kesulitan dalam memperoleh informasi terbaru, sehingga kesenjangan digital ini menjadi penghalang signifikan dalam pelaksanaan program, padahal MBG sangat bergantung pada koordinasi dan pembaruan informasi dari pusat.

Jayanthi & Dinaseviani (2022) menunjukkan bahwa kesenjangan digital di Indonesia semakin memperburuk ketimpangan layanan publik, terutama pada program berbasis teknologi seperti MBG. Masalahnya tidak hanya terkait dengan infrastruktur, tetapi juga dengan rendahnya literasi digital di kalangan pelaksana program. Banyak guru atau staf sekolah yang belum terbiasa menggunakan sistem online untuk pelaporan dan koordinasi, yang menyebabkan data terlambat dilaporkan dan menyulitkan pihak pusat dalam memantau serta mengevaluasi program. Wulandari (2025) menegaskan bahwa kemampuan digital pelaksana di tingkat akar rumput adalah prasyarat penting agar kebijakan seperti MBG dapat dijalankan secara optimal. Banyak pelaksana Program MBG yang belum memiliki keterampilan komunikasi yang memadai, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat seringkali tidak seragam dan membingungkan. Alamsyah (2021) menyatakan bahwa pelatihan komunikasi bagi pelaksana publik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program dan mendorong partisipasi masyarakat. Penerima manfaat perlu memahami dengan jelas tujuan serta cara kerja program agar dapat berperan aktif. Sayangnya, masyarakat sering tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi program. Sosialisasi cenderung berjalan satu arah, dari pemerintah ke masyarakat, tanpa memberi ruang bagi mereka untuk memberikan masukan. Hal ini menyebabkan rasa memiliki masyarakat terhadap program menjadi lemah.

Suryaningsih & Ivanna (2024) menekankan bahwa pendekatan komunikasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan. Salah satu tantangan besar adalah ketidaksesuaian strategi komunikasi dengan konteks lokal. Tidak semua daerah memiliki karakter sosial dan budaya yang sama apa yang berhasil di kota besar belum tentu cocok di desa terpencil. Oleh karena itu, Herdiana (2025) mengingatkan bahwa program nasional seperti MBG perlu memperhatikan kearifan lokal dan budaya komunikasi masyarakat setempat. Pendekatan semacam ini membuat program lebih mudah diterima dan masyarakat merasa lebih terlibat serta dekat dengan pelaksanaan program. Pemanfaatan media sosial sebenarnya dapat menjadi jembatan efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung Program MBG, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Alamsyah (2021) menegaskan bahwa jika pemerintah daerah aktif menggunakan media sosial, maka transparansi dan interaksi publik akan meningkat. Oleh karena itu, kapasitas komunikasi digital pemerintah daerah perlu diperkuat. Mengatasi hambatan dalam MBG membutuhkan langkah sistemik, seperti menyusun regulasi teknis yang jelas, melatih pelaksana dalam keterampilan komunikasi, serta memperluas akses digital. Partisipasi publik juga

perlu ditingkatkan melalui dialog dua arah dan media yang mudah diakses. Reformasi komunikasi ini akan membuat program lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.



Gambar 1. Analisis Tematik Hambatan Program MBG

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi berbagai hambatan yang dapat dikelompokkan ke dalam lima tema besar berdasarkan analisis terhadap tujuh sumber literatur yang dikutip sebelumnya. Setiap tema dianalisis berdasarkan frekuensi kemunculan dalam literatur sebagai indikator proporsi kepentingannya. Dari total sepuluh kutipan referensi (karena beberapa sumber muncul lebih dari sekali), proporsi masing-masing tema dihitung dan dikonversi menjadi persentase untuk mendapatkan gambaran tematik yang lebih terstruktur. Pertama, ketimpangan regulasi menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan hambatan, berdasarkan dua referensi yang menyoroti belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan (Sarjito, 2024) dan lemahnya koordinasi antarinstansi akibat kurangnya regulasi operasional. Hambatan ini menjadi dasar yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh. Kedua, hambatan komunikasi teknis mencakup 30% dari hambatan yang dianalisis. Hal ini didukung oleh tiga referensi, yakni CISDI (2025), Herdiana (2025), dan Amam & Rusdiana (2022), yang menyoroti kurangnya pedoman komunikasi dan perbedaan pemahaman antar pelaksana di daerah. Dampaknya adalah distribusi makanan yang tidak merata dan kegagalan dalam menyampaikan tujuan program secara seragam ke seluruh pihak. Ketiga, kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi juga menyumbang 30% dari hambatan, berdasarkan tiga literatur (Jayanthi & Dinaseviani, 2022; Wulandari, 2025). Tema ini menggambarkan bagaimana terbatasnya akses internet serta minimnya kemampuan pelaksana dalam menggunakan teknologi digital menghambat pelaporan data dan proses monitoring program secara nasional. Keempat, komunikasi partisipatif dan konteks lokal juga berkontribusi sebesar 30%, karena muncul dalam tiga referensi utama: Alamsyah (2021), Suryaningsih & Ivanna (2024), dan Herdiana (2025). Literasi ini menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat, penyesuaian strategi komunikasi dengan budaya lokal, serta kebutuhan untuk membangun dialog dua arah agar program dapat diterima secara luas dan berkelanjutan. Terakhir, pemanfaatan media sosial dan digitalisasi komunikasi menempati 20% dari hambatan berdasarkan dua kutipan dari Alamsyah (2021), yang menekankan pentingnya penguatan komunikasi digital dan pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Berdasarkan jumlah referensi yang relevan, analisis ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar berasal dari aspek komunikasi teknis, literasi digital, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan pelaksanaan Program MBG perlu dimulai dengan memperbaiki komunikasi lintas sektor, memperkuat kapasitas pelaksana di lapangan, dan menyusun strategi komunikasi yang sesuai dengan konteks lokal serta memanfaatkan media digital secara optimal.

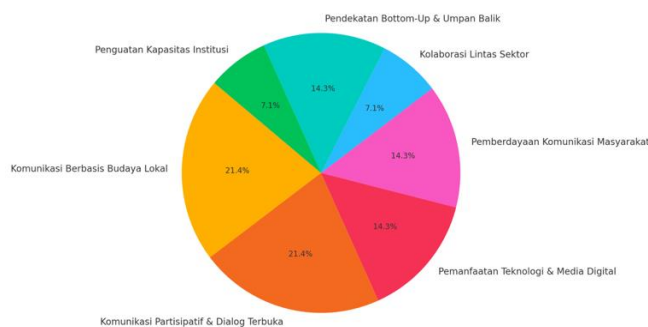
### 3.1.2 Strategi Reformulasi Kebijakan Komunikasi untuk Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif memerlukan kebijakan komunikasi yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara adil, tanpa memandang latar belakang budaya, sosial, atau ekonomi. Sayangnya, banyak kebijakan saat ini yang belum memperhitungkan keberagaman tersebut, sehingga

akses informasi dan partisipasi masyarakat menjadi timpang. Hanif & Setyawan (2024) menyampaikan bahwa strategi komunikasi berbasis budaya lokal dapat memperkuat penyampaian informasi, terutama di komunitas adat terpencil. Mereka juga menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat dan membuka ruang dialog agar strategi komunikasi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Strategi komunikasi partisipatif menjadi elemen penting dalam merancang kebijakan komunikasi yang inklusif. Pendekatan ini mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan dalam menentukan arah kebijakan. Zahra (2023) menekankan bahwa komunikasi partisipatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial, seperti disabilitas intelektual, serta membentuk sikap yang lebih inklusif. Melalui dialog terbuka, masyarakat lebih memahami persoalan yang ada dan terdorong untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan ramah bagi semua kalangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti media sosial, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya semakin penting dalam strategi komunikasi pembangunan. Teknologi ini membantu menyebarkan informasi lebih luas dan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat. Namun, masih ada tantangan berupa kesenjangan digital, terutama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar pesan dapat diterima dengan baik. Fajri *et al.* (2018) menegaskan bahwa efektivitas penyampaian informasi sangat bergantung pada pemilihan media yang sesuai dengan kemampuan dan akses masyarakat di daerah masing-masing. Agar komunikasi pembangunan berjalan inklusif, kebijakan harus memperhatikan keragaman bahasa dan budaya masyarakat. Salah satu cara efektif adalah dengan menggunakan bahasa lokal dan simbol budaya yang akrab bagi warga setempat dalam setiap materi komunikasi. Pendekatan ini membuat pesan lebih mudah dipahami dan diterima. Hanif & Setyawan (2024) menekankan pentingnya menyesuaikan isi pesan dengan konteks budaya lokal agar informasi tidak hanya sampai, tetapi juga bermakna bagi masyarakat. Dengan begitu, partisipasi dan keterlibatan warga dalam program pembangunan akan meningkat karena mereka merasa dihargai dan diajak berbicara dalam "bahasa" mereka sendiri.

Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan adalah bagian penting dalam merancang kebijakan komunikasi yang lebih baik. Melalui proses ini, hambatan yang muncul di lapangan dapat segera dikenali dan strategi komunikasi dapat disesuaikan dengan perubahan sosial di masyarakat. Zahra (2023) menegaskan bahwa evaluasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program pembangunan. Dengan membuka ruang dialog selama evaluasi, masyarakat merasa lebih dilibatkan dan kebijakan pun menjadi lebih responsif. Proses ini membantu memastikan bahwa strategi komunikasi tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di tingkat lokal. Pemberdayaan masyarakat lewat pelatihan dan pendidikan komunikasi merupakan langkah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Ketika masyarakat memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mereka dapat lebih percaya diri terlibat dalam diskusi, menyampaikan pendapat, serta ikut mengambil keputusan penting. Hal ini membuat proses pembangunan menjadi lebih partisipatif dan adil. Fajri *et al.* (2018) menekankan bahwa pelatihan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi warga sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Dengan kapasitas komunikasi yang memadai, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan di lingkungan mereka. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk mendukung strategi komunikasi yang inklusif. Dengan bekerja sama, ketiga pihak ini dapat saling melengkapi pemerintah memberikan arah kebijakan, organisasi sipil menjembatani dengan masyarakat, dan sektor swasta membantu dari sisi teknologi maupun pendanaan. Hanif & Setyawan (2024) menekankan bahwa kemitraan lintas sektor mampu meningkatkan efektivitas komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Kolaborasi ini juga memperkuat daya jangkau program pembangunan, sehingga pesan-pesan penting dapat tersampaikan dengan cepat, tepat, dan menyeluruh ke berbagai kalangan masyarakat.

Kebijakan komunikasi yang inklusif harus mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara nyata. Salah satu cara efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan pendekatan *bottom-up*, yaitu merancang kebijakan berdasarkan masukan langsung dari masyarakat. Dengan demikian, suara warga benar-benar didengar dan dijadikan dasar dalam proses pembangunan. Zahra (2023) menegaskan pentingnya adanya mekanisme umpan balik yang jelas dan terbuka agar kebijakan komunikasi dapat terus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pendekatan ini membuat kebijakan menjadi lebih responsif, adaptif, dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat secara tepat sasaran. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah sangat penting agar strategi komunikasi pembangunan berjalan lebih inklusif dan efektif. Pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi akan membantu aparatur pemerintah menyusun dan menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat. Fajri *et al.* (2018) menekankan bahwa penguatan kelembagaan ini menjadi kunci sukses strategi komunikasi pembangunan. Secara keseluruhan, reformulasi kebijakan komunikasi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Ini mencakup penyesuaian pesan sesuai budaya lokal, pemanfaatan teknologi yang sesuai, serta pelibatan aktif masyarakat agar pembangunan terasa adil, merata, dan berkelanjutan bagi semua.



Gambar 2. Proporsi Tema Strategi Reformulasi Kebijakan Komunikasi

Diagram di atas menunjukkan proporsi kemunculan tema-tema strategis dalam literatur yang membahas reformulasi kebijakan komunikasi untuk pembangunan inklusif. Dua tema yang paling dominan, masing-masing sebesar 21,4%, adalah komunikasi berbasis budaya lokal dan komunikasi partisipatif serta dialog terbuka. Hanif & Setyawan (2024) menekankan pentingnya penyampaian informasi yang disesuaikan dengan simbol budaya dan bahasa lokal agar pesan tidak hanya sampai, tetapi juga bermakna bagi masyarakat. Di sisi lain, Zahra (2023) menyoroti peran komunikasi partisipatif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu sosial dan meningkatkan keterlibatan dalam proses pembangunan melalui dialog terbuka dan evaluasi yang melibatkan warga. Tiga tema lainnya muncul dengan frekuensi 14,3%: pemanfaatan teknologi informasi dan media digital, pemberdayaan komunikasi masyarakat, serta pendekatan *bottom-up* dan umpan balik. Fajri *et al.* (2018) menegaskan bahwa efektivitas penyampaian informasi sangat ditentukan oleh pemilihan media yang sesuai dengan akses masyarakat, dan bahwa pelatihan komunikasi adalah bagian penting dari upaya pemberdayaan warga agar mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan. Zahra (2023) juga menekankan bahwa pendekatan *bottom-up* serta mekanisme umpan balik terbuka dapat menjadikan kebijakan lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Dua tema terakhir, yang masing-masing memiliki proporsi 7,1%, adalah kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas institusi. Hanif & Setyawan (2024) menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk memperluas jangkauan pesan komunikasi dan memperkuat partisipasi publik. Sementara itu, Fajri *et al.* (2018) menambahkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi sangat dibutuhkan agar institusi pemerintah mampu menyusun strategi komunikasi yang efektif dan inklusif. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan komunikasi yang efektif dalam konteks pembangunan inklusif harus mengedepankan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal.

Hal ini mencakup penggunaan bahasa, simbol, serta nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat sebagai medium utama penyampaian pesan. Strategi semacam ini membuat komunikasi menjadi lebih bermakna dan diterima secara emosional oleh masyarakat, terutama di komunitas terpencil atau adat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat melalui komunikasi partisipatif memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang ikut menentukan arah pembangunan. Pendekatan ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara warga dan pengambil kebijakan. Di sisi lain, keberhasilan reformulasi juga sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta penguatan kapasitas kelembagaan. Pemanfaatan media digital seperti media sosial dan aplikasi daring dapat memperluas jangkauan informasi dan membuka ruang partisipasi yang lebih dinamis. Namun, hal ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital di kalangan pelaksana maupun masyarakat. Tidak kalah penting, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta dapat memperkaya sumber daya, inovasi, dan jejaring dalam menyusun strategi komunikasi. Jika dikombinasikan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pemerintah, maka kebijakan komunikasi yang inklusif dan adaptif dapat terwujud, menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

### 3.2 Pembahasan

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah ketimpangan regulasi yang disebabkan oleh ketiadaan petunjuk teknis yang jelas. Hal ini menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana dan lemahnya koordinasi antarinstansi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pelaksanaan program tersebut. Sarjito (2024) menyoroti bahwa kurangnya regulasi operasional yang rinci menjadi penghalang utama dalam implementasi program ini, yang seharusnya dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, komunikasi teknis yang tidak efektif juga menjadi hambatan besar. CISDI (2025), Herdiana (2025), dan Amam & Rusdiana (2022) menunjukkan bahwa kurangnya pedoman komunikasi yang jelas dan perbedaan pemahaman antar pelaksana di daerah menyebabkan distribusi makanan yang tidak merata serta kegagalan dalam menyampaikan tujuan program dengan seragam ke semua pihak. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya pedoman komunikasi yang lebih terstruktur agar pelaksanaan program di lapangan bisa berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi juga merupakan hambatan yang signifikan. Jayanthi & Dinaseviani (2022) serta Wulandari (2025) menjelaskan bahwa terbatasnya akses internet dan rendahnya literasi digital di daerah-daerah tertentu menghambat pelaporan data dan memengaruhi proses monitoring program secara nasional. Dengan keterbatasan ini, program menjadi kurang terpantau dan sulit untuk dievaluasi dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital di kalangan pelaksana dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan seperti MBG dapat dijalankan dengan efektif.

Selain itu, komunikasi partisipatif menjadi elemen penting dalam keberhasilan program ini. Suryaningsih & Ivanna (2024) serta Herdiana (2025) menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program agar program dapat lebih diterima dan relevan dengan kebutuhan mereka. Pendekatan berbasis budaya lokal, seperti yang dijelaskan oleh Hanif & Setyawan (2024), juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pesan komunikasi dapat diterima dengan baik dan bermakna bagi masyarakat. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital lainnya juga harus diperkuat, mengingat potensi besar yang dimilikinya dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Alamsyah (2021) menunjukkan bahwa media sosial dapat memperluas jangkauan komunikasi dan meningkatkan interaksi publik, namun pemanfaatannya saat ini masih belum optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komunikasi digital di tingkat daerah menjadi langkah penting untuk memperbaiki implementasi program. Reformulasi kebijakan komunikasi yang inklusif dan berbasis pada partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan program MBG. Zahra (2023) menekankan bahwa pendekatan *bottom-up* dan mekanisme umpan balik terbuka dapat menjadikan kebijakan lebih

responsif terhadap kondisi lapangan dan memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan komunikasi juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat berperan aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait program. Fajri *et al.* (2018) menambahkan bahwa pelatihan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi warga, tetapi juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Dengan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan di pemerintah, kebijakan komunikasi yang inklusif dan adaptif dapat diwujudkan, menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mencegah stunting di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan regulasi dan komunikasi. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah ketiadaan petunjuk teknis yang rinci, yang menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi juga menghambat kelancaran program, sehingga tujuan dari MBG tidak dapat tercapai secara optimal. Tidak kalah pentingnya, strategi komunikasi yang kurang adaptif terhadap konteks lokal dan perkembangan teknologi digital turut memperburuk situasi ini, menyebabkan distribusi dan pemahaman program yang tidak merata di seluruh wilayah. Penelitian ini menekankan bahwa reformulasi kebijakan komunikasi sangat diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Kebijakan komunikasi yang berbasis budaya lokal dan partisipatif, serta memanfaatkan teknologi informasi, dapat memperkuat efektivitas implementasi. Komunikasi yang inklusif, yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan program, akan membuat mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program. Selain itu, pelatihan untuk pelaksana program, peningkatan literasi digital di kalangan pelaksana dan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta akan semakin memperkuat keberlanjutan dan keberhasilan MBG. Implementasi program dapat menjadi lebih terarah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

#### 5. Daftar Pustaka

- Booth, A., Martyn-St James, M., Clowes, M., & Sutton, A. (2021). Systematic approaches to a successful literature review.
- Hanif, N. W., & Setyawan, S. (2024). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan dengan Komunitas Adat Terpencil (Suku Dayak Meratus). *Jurnal Audiens*, 5(4), 686-697. <https://doi.org/10.18196/jas.v5i4.531>.
- Hapsari, A. P., Setiawan, F., Urbaningkrum, S. M., Rahmawati, U., Afifah, M. N., & Rohmah, F. N. (2022). Analisis urgensi proses legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 2(2), 67-77. <https://doi.org/10.54297/seduj.v2i2.247>.
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan digital dan solusi yang diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informatika)*, 24(2), 187-200. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>.

- Khairil, M. (2011). Strategi Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik Poso. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(3), 266-279. <https://doi.org/10.31315/jik.v9i3.3436>.
- Khatimah, A. W. N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1969-1976. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.815>.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2009). The literature review: Six steps to success.
- Nomor, P. P. R. I. (83). Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
- Rayhan, M. (2025). Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 370-380. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4154>.
- Ritonga, A. R., & Sazali, H. (2025). Analisis Komunikasi Pembangunan Terhadap Regulasi dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis. *Padaseva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 32-40.
- Sarjito, A. (2024). Free nutritious meal program as a human resource development strategy to support national defence. *International Journal Administration, Business & Organization*, 5(5), 129-141. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.454>.
- Supriyanto, D., Nuryanti, N., & Noegroho, A. (2024). Media Sosial dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7796-7810. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14048>.
- Tsany, H. R., & Hapsari, S. A. (2025). Partisipasi Sosial Penyandang Disabilitas Roemah Difabel di Lingkungan Kerja. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1).
- Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2025, June). Politik Di Balik Piring: Analisis Literatur Atas Kebijakan Makan Bergizi Gratis. In *Seminar Nasional Pemerintahan dan Desa* (Vol. 1, No. 1).
- Zainal, A. G. (2018). Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan. *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 3(1).